

**ANALISIS APLIKASI PENGUJIAN SUBSTANTIF
ATAS SALDO PIUTANG DAGANG
PADA PT.HADJI KALLA**



Diajukan oleh:

WEPANANGRENG

450 201 3070

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**JURUSAN AKUTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2007**

**ANALISIS APLIKASI PENGUJIAN SUBSTANTIF
ATAS SALDO PIUTANG DAGANG
PADA PT.HADJI KALLA**



Diajukan oleh:

WEPANANGRENG

450 201 3070

SKIRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**JURUSAN AKUTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2007**


HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS APLIKASI PENGUJIAN SUBSTANTIF
ATAS SALDO PIUTANG DAGANG PADA
PT. HADJI KALLA

NAMA MAHASISWA : WEPANANGARENG
NO. STAMBUK : 45 02 013 070
FAKULTAS/JURUSAN : EKONOMI / AKUNTANSI
TEMPAT PENELITIAN : PT. HADJI KALLA MAKASSAR

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I



DRS. MANSYUR SAIN, DESS, Ak

PEMBIMBING II



FARIDAH, SE., Ak.

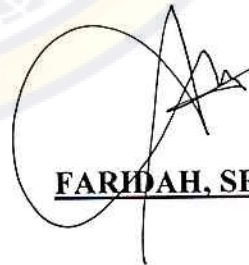
MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas "45" Makassar

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

KETUA JURUSAN AKUNTANSI



HAERUDDIN SALEH, SE., M.Si.



FARIDAH, SE., Ak.

Tanggal Pengesahan

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Rabu / 1 Agustus 2007

Skripsi Atas Nama : WEPANANGARENG

No. Stambuk / NIRM : 45 02 013 070

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas "45"
Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : **Prof. DR. H. Abu Hamid**
(Rektor Universitas "45")

(.....)

Ketua : **Haeruddin Saleh, SE., M.Si.**
(Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

(.....)

Sekretaris : **Herminawaty, SE., MM.**

(.....)

Anggota Penguji : 1. Drs. Marjuni, M.Si.

(.....)

2. Thanwain, SE.

(.....)

3. Faridah, SE., Ak.

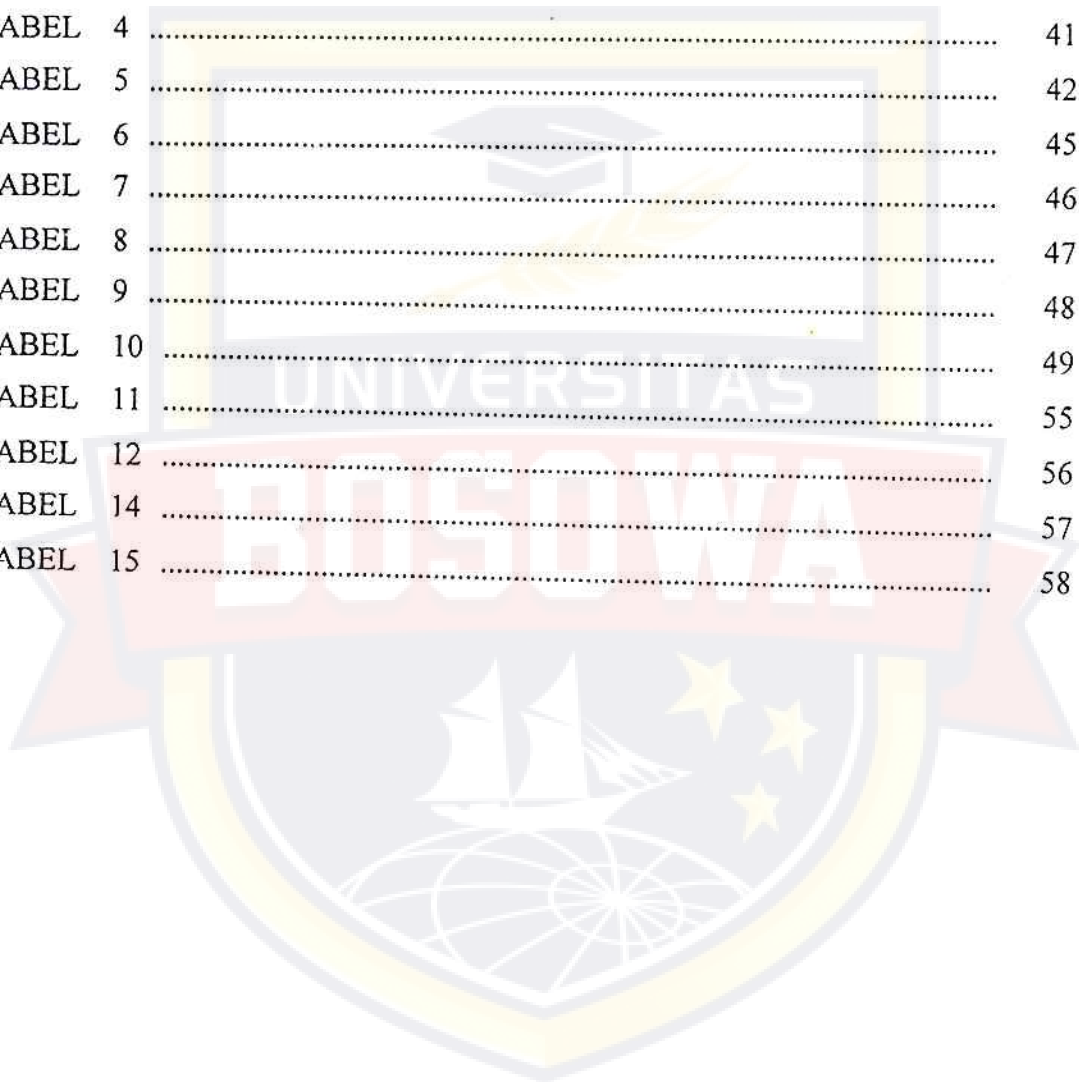
(.....)

4. Firman Menne, SE., M.Si. Ak.

(.....)

DAFTAR TABEL

TABEL 1	25
TABEL 2	25
TABEL 3	40
TABEL 4	41
TABEL 5	42
TABEL 6	45
TABEL 7	46
TABEL 8	47
TABEL 9	48
TABEL 10	49
TABEL 11	55
TABEL 12	56
TABEL 14	57
TABEL 15	58



DAFTAR SKEMA

SKEMA 1	22
SKEMA 2	34



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah Pokok.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Piutang	6
2.2 Prinsip Akuntansi yang Lazim dalam Penyajian Piutang Neraca	7
2.3 Pengertian Pemeriksaan	9
2.4 Tujuan Pemeriksaan Terhadap Piutang.....	13
2.5 Tujuan Pengujian Substantif Terhadap Piutang.....	14
2.6 Pengertian Program dan Prosedur Pemeriksaan.....	16
2.7 Program Pengujian Substantif Terhadap Piutang	17
2.8 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Piutang..	20

2.9 Hipotesis.....	22
2.10 Kerangka Pikir	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Metode Pengumpulan Data	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Metode Analisis	24
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	25
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	25
4.2 Struktur Organisasi	33
4.3 Sistem Penjualan.....	36
4.4 Prosedur Pencatatan Piutang	37
BAB V PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS SALDO PIUTANG DAGANG PADA PT. HJKL MAKASSAR	42
5.1 Tujuan Pemeriksaan.....	42
A. Prosedur Analitik Berdasarkan Tujuan Pemeriksaan	42
B. Pengujian Kepatuhan Berdasarkan Tujuan Pemeriksaan	43
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, dan tak lupa pula penulis kirimkan salam taslim kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi "45" Makassar.

Berbagai kesulitan dan hambatan yang ditemukan dalam penyusunan skripsi, namun berkat usaha dan do'a kesulitan dan hambatan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk berbuat lebih baik.

Selanjutnya sembah sujud penulis haturkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda H. Sukardi dan Ibunda Hj. Andi Mappiati yang telah mendidik membiayai dan mendo'akan penulis selama mengikuti pendidikan.

Seiring dengan rampungnya penyusunan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs. Masyur, M.Si dan Ibu Faridah, SE, AK., selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan petunjuk serta bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Haeruddin, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Faridah, SE, AK., selaku Ketua Jurusan Akuntansi serta seluruh dosen dan karyawan, karyawan pada Fakultas Ekonomi Uni "45" Makassar yang telah memberi ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama myls studi.
5. Bapak pimpinan perusahaan dan seluruh staff pada PT. Hadji Kalla Makassar yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama penulis melakukan penelitian.
6. Buat Adikku bsta keluarga besarku yang telah memberikan dorongan, bantuan, dan do'anya dengan penuh keiklasan.
7. Buat sahabatku : Yuli, Basdiana, Dewi, Dian yang senantiasa memberikan motivasi, dorongan, dan masukan kepada penulis dan semua rekan-rekan khususnya Angkatan 2002 Jurusan Akuntansi yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

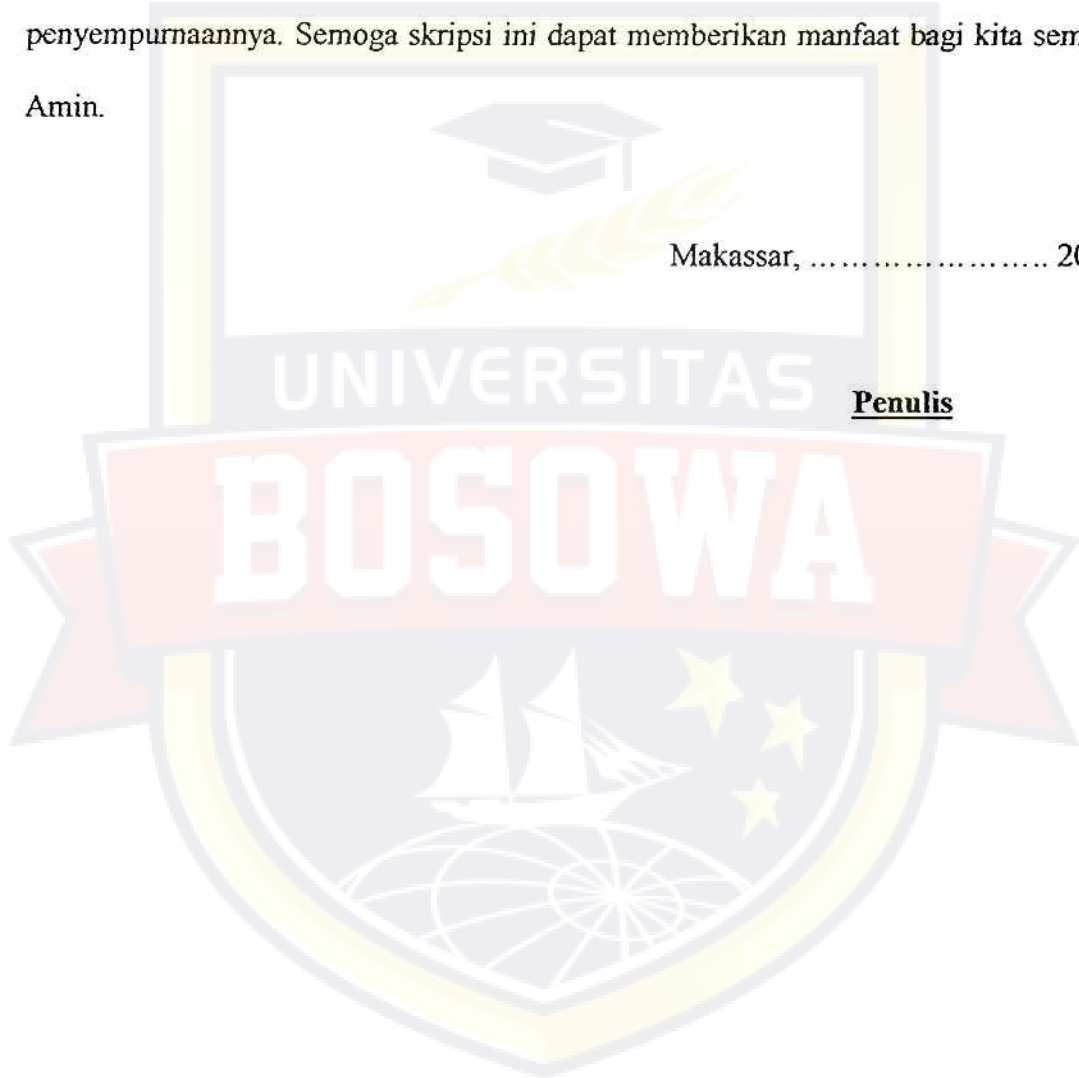
Akhirnya, dengan menyadari bahwa segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, maka penulis sangat menyadari jika dalam penulis skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangatlah berharga untuk penyempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua..

Amin.

Makassar, 2007

Penulis

BOSOWA



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap badan usaha tentu mempunyai catatan tentang keadaan dan keuangannya. Catatan ini penting sebagai data bagi laporan keuangan badan usaha yang bersangkutan. Proses ini dikenal dengan pelaksanaan fungsi akuntansi yang terdiri dari tahapan pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan memberikan informasi kepada pembaca mengenai keadaan finansial perusahaan. Bentuk umum dari laporan keuangan adalah neraca, yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu, rugi laba, menerangkan hasil operasi perusahaan selama satu periode tertentu, laporan arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

Penyusunan laporan keuangan tidak hanya ditujukan bagi keperluan intern manajemen perusahaan, tetapi juga untuk luar yang tertarik dengan keadaan keuangan perusahaan. Pihak yang berminat terhadap laporan keuangan perusahaan adalah pemegang saham, kreditor, supplier, langganan, pemerintah, karyawan perusahaan dan calon investor.

Masalahnya laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan tidak selamanya bisa di percaya dan diterima pihak luar. Pihak luar meragukan reliabilitas laporan keuangan tersebut, karena mungkin terjadi hal-hal seperti ; adanya kealpaan, sengaja atau tidak sengaja; adanya manipulasi data karena

perbedaan kepentingan intern dengan kepentingan ekstern; kurangnya pengetahuan manajemen perusahaan. Oleh karenanya, laporan keuangan tersebut perlu diperiksa dulu oleh pihak independen, yakni profesi auditor.

Dalam pelaksanaan audit, tugas auditor adalah memeriksa kelayakan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Auditor harus memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan tersebut, apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pendapat yang diharapkan dari seorang auditor adalah pendapat yang objektif, seesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Pendapat itu harus dipertimbangkan masak-masak, karena harus dipertanggungjawabkan secara profesional.

Tuntutan ini mengakibatkan auditor harus mengumpulkan bahan bukti guna mendukung pendapat yang akan diberikannya terhadap kelayakan laporan keuangan. Sebagian besar pekerjaan auditor akan meliputi bidang pengumpulan bahan bukti dan kemudian menilainya. Auditor akan memformulasikan pendapatnya mengenai kelayakan laporan keuangan yang diperiksa berdasarkan dari hasil penilaian bahan bukti tadi dan sumber utama bahan bukti adalah dari catatan-catatan akuntansi. PT. HJKL merupakan salah satu perusahaan yang relatif besar di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dituntut menggunakan manajemen akuntansi yang baik diharapkan dapat memungkinkan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat.

PT. HJKL bergerak dalam bidang penjualan mobil jenis Toyota, spare part Toyota, perdagangan aspal serta perdagangan umum yang memiliki beberapa cabang dan perwakilan di Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan volume transaksi yang jumlahnya besar, utamanya transaksi penjualan kredit yang akan menimbulkan piutang bagi perusahaan. Piutang adalah salah satu rekening penting dari neraca yang juga akan diperiksa oleh auditor, beberapa alasan mengapa dilakukan pemeriksaan terhadap perkiraan piutang, karena piutang adalah rekening paling liquid setelah kas yang mudah diselewangkan; piutang yang tercantum dalam neraca diragukan keberadaannya atau eksistensinya; piutang terdiri atas beberapa golongan piutang wesel yang didiskontokan biasanya menimbulkan kewajiban bersyarat (*contingent liability*).

Piutang yang berhasil ditagih akan berubah menjadi uang tunai, sedang saldo piutang adakalanya tidak berhasil ditagih atau dihapuskan dan jumlahnya besar, akan mempunyai dampak yang buruk bagi jalannya aktivitas perusahaan (mengganggu likuiditas keuangan perusahaan). Untuk mendukung keadaan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, diperlukan suatu sistem yang mutlak ada dalam perusahaan karena salah satu fungsinya mengamankan harta perusahaan, termasuk di dalamnya piutang dagang. Namun demikian bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat memberikan jaminan seratus persen tujuan yang direncanakan akan tercapai. Keterbatasan timbul karena adanya beberapa faktor, antara lain faktor biaya dan manusia.

Pengujian substantif dilakukan untuk mendapat dasar yang meyakinkan atau dapat dipercaya dalam pemberian pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan kompeten. Bukti-bukti seperti ini hanya dapat diperoleh melalui pengujian substansif.

Karena pentingnya pengujian substansif ini dalam memperoleh bukti yang mendukung pemeriksaan laporan keuangan, maka penulis tertarik untuk membahas **Aplikasi Pengujian Substansif Atas Saldo Piutang pada PT. "HJKL"**.

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok masalah adakah apakah saldo piutang yang tercantum pada neraca PT "JHKL" untuk periode tahun 2005 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Membuktikan eksistensi piutang yang dicantumkan di dalam neraca.
2. Membuktikan hak pemilikan klien atas piutang yang dicantumkan didalam neraca
3. Membuktikan ketetapan pisah batas (cut off) transaksi yang bersangkutan di dalam neraca.

4. Membuktikan kewajaran penyajian piutang di dalam neraca

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagi perusahaan, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kegunaan penerapan pengujian substansif atas saldo piutang dagang yang sekiranya membantu pihak perusahaan.
2. Bagi penulis, untuk menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai pengujian substansif atas saldo piutang dagang.
3. Bagi pembaca, penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur/bahan bacaan yang berguna, mengenai pengujian, substansif atas saldo piutang dagang.

BOSOWA

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Piutang

Beberapa definisi dari pengertian piutang dagang, Ikatan Akuntan Indonesia. (2004 : 23) memberikan definisi piutang dagang sebagai berikut : “Menurut sumber terjadiya. piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang lain-lain. piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain”.

Al. Harjono Jusuf mendefinisikan piutang adalah “Merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi, yang pada umumnya adalah transaksi penjualan kredit”.

Selanjutnya Mulyadi mengemukakan pengertian piutang dagang sebagai berikut : “Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan”.

Seorang akuntan sebelum menentukan prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dijalankan terlebih dahulu harus mengetahui dengan tepat tujuan pemeriksaanya. Tanpa penetapan tujuan pemeriksaan, kita sebenarnya tidak mempunyai pegangan apakah program pemeriksaan mencakup prosedur-prosedur yang dapat mencapai tujuannya.

terdapat keadaan yang mengharuskan prosedur yang semula direncanakan kemudian harus diubah. Tanpa penetapan tujuan terlebih dahulu, sangatlah sukar menentukan apakah pekerjaan mencapai sasarannya.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah :

- Suatu rekening yang timbul dari penjualan barang yang penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
- Merupakan hak untuk menagih sejumlah uang, yang timbul dari transaksi penjualan kredit.
- Suatu klaim yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau satu siklus kegiatan perusahaan.

2.2 Prinsip Akuntansi yang Lazim dalam Penyajian Piutang di Neraca

Penyajian unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Demikian pula dengan rekening piutang dalam penyajiannya di neraca.

Dalam hubungannya dengan piutang, Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan mengemukakan :

“Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang digunakan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih”.

Pada prinsip di atas dapat diketahui bahwa untuk melaporkan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan akan dapat ditagih. Jumlah piutang yang diharapkan akan dapat ditagih dihitung dengan mengurangi jumlah piutang keseluruhan dengan jumlah yang diperkirakan tidak akan ditagih. Karena neraca disusun pada setiap akhir periode maka setiap akhir tahun perlu dihitung jumlah kerugian dari piutang.

Dalam mengalami kerugian piutang terdapat dua macam cara yaitu dengan menggunakan metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Tetapi penggunaan metode penghapusan langsung tidak dapat melaporkan piutang dalam jumlah yang diharapkan bisa ditagih, karena neraca menunjukkan jumlah bruto piutang, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kuntansi di muka.

Menurut Al. Haryono Jusuf, (1993 : 22) dalam metode cadangan kerugian piutang ada dua dasar yang digunakan untuk menaksir jumlah piutang yang tidak dapat ditagih yaitu :

- Persentase dari penjualan
- Persentase dari piutang

Apabila menggunakan dasar persentase dari penjualan mengakibatkan penandingan (matching) yang lebih baik antar pendapatan dan biaya. Sedangkan jika menggunakan dasar persentase dari piutang akan menghasilkan penaksiran yang lebih baik tentang jumlah nilai piutang yang dapat direalisasi.

2.3 Pengertian Pemeriksaan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian auditing, maka terlebih dahulu dikemukakan tentang beberapa istilah yang sering digunakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan dan banyak dikacaukan pemakainya. Istilah-istilah tersebut adalah prinsip pemeriksaan, norma pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan.

Tuanakotta memberikan defenisi dari keempat istilah tersebut, sebagai berikut :

- Prinsip pemeriksaan (*auditing principle*), adalah kebenaran dasar (*basic truth*) yang menunjukkan bagaimana tujuan pemeriksaan tercapai.
- Norma pemeriksaan (*auditing standards*), adalah merupakan ukuran mutu pekerjaan akuntan.
- Teknik pemeriksaan (*audit techniques*), adalah cara untuk mendapatkan pembuktian.
- Prosedur pemeriksaan (*audit procedures*), adalah merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan pemeriksaan. Prosedur-prosedur tertulis yang dibuat sebelum pelaksanaan pemeriksaan disebut program pemeriksaan (*audit program*).

Dan dari beberapa defenisi tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur penting yang akan diuraikan lebih lanjut berikut ini :

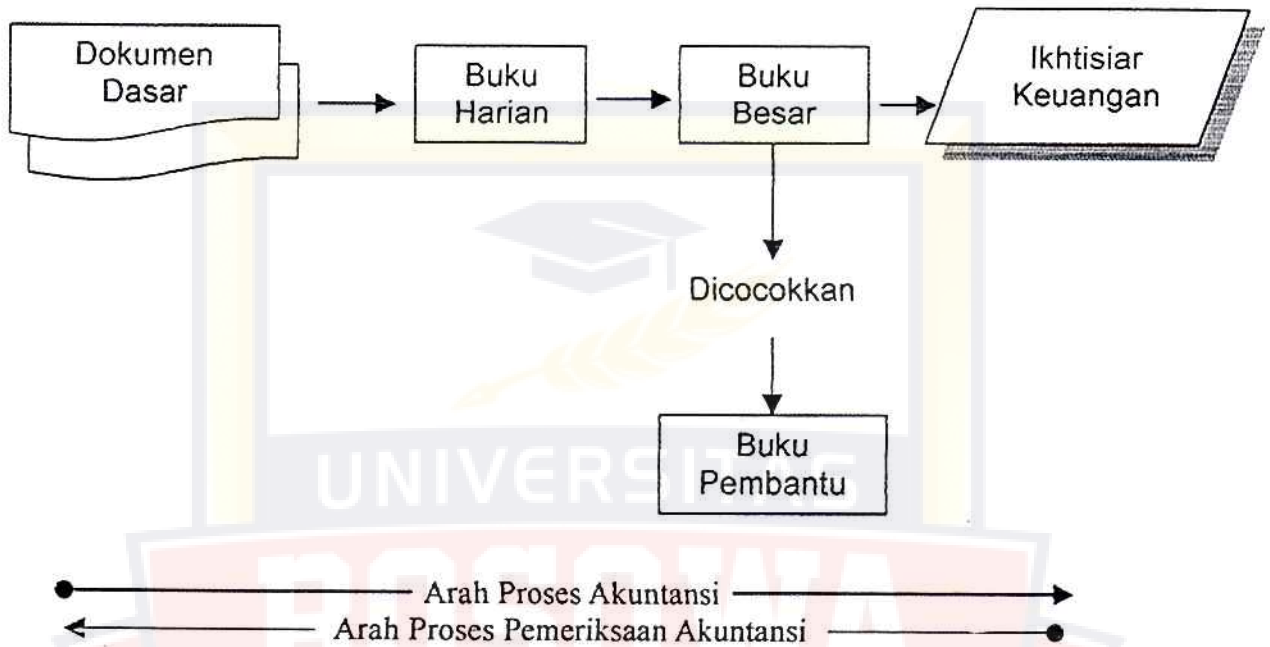
1. *Suatu proses sistematika terpadu*

Pemeriksaan akuntan merupakan suatu proses sistematika, yaitu berupa rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Pemeriksaan akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

2. *Pengumpulan dan penilaian bukti-bukti secara objektif*

Proses sistematika tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat tanpa memihak dan berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Proses penentuan jumlah bukti yang diperlukan dan penilaian apakah informasi yang ada sesuai dengan kriteria yang ada akan merupakan bagian yang kritis dari setiap pemeriksaan.

Gambar 1.
Arah Proses Akuntansi dan
Pemeriksaan Akuntansi



3. *Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi*

Yang dimaksudkan dengan pernyataan disini adalah hasil proses akuntansi yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan pokok yaitu : neraca, laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat pula berupa biaya pusat pertanggungjawaban tertentu di dalam perusahaan.

4. *Menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan kriteria yang telah ditetapkan*

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menעיין dekat tidaknya

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang telah ditetapkan itu adalah patokan atau standar yang digunakan auditor untuk menilai pernyataan-pernyataan (hasil proses akuntansi) tersebut.

Patokan atau standar itu dapat berupa :

- a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
- b. Anggaran atau ukuran lain yang ditetapkan oleh manajemen
- c. Prinsip akuntansi yang lazim (*generally accepted accounting principles*).

5. *Seorang ahli yang bebas (Competent independent person)*

Dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor haruslah mempunyai keahlian untuk mengetahui kriteria yang digunakan, jenis-jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat. Disamping keahlian auditor juga harus memiliki sikap mental yang bebas (tidak memihak) baik dalam kebebasan yang nyata (*independence in appearance*). Karena pemakai tidak akan merasa puas bila mereka yakin bahwa auditor berpihak dalam pendapat yang diberikan.

6. *Pelaporan (reporting)*

Tahap akhir dalam suatu proses pemeriksaan akuntan adalah penyampaian hasil yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan akuntan (*auditing report*) atau sering pula disebut pengesahan.

7. *Pihak yang berkepentingan*

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan ini adalah : pemegang saham manajemen, calon investor, organisasi buruh dan inspeksi pajak.

Menurut Kell. Boynton dan Ziegler, pemeriksaan secara profesional biasanya dapat digolongkan ke dalam tiga cabang, yaitu :

1. Independent auditor
2. Internal auditor
3. Government auditors

Pada umumnya pelaksanaan pemeriksaan pada ketiga cabang auditing adalah sama, yang berbeda hanya tingkat independensi pemeriksa.

2.4 Tujuan Pemeriksaan Terhadap Piutang

Menurut Tuanakotta, pemeriksaan atas perkiraan piutang. Piutang mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menentukan bahwa piutang-piutang tersebut memang ada dan tidak fiktif.
2. Untuk menentukan bahwa piutang-piutang yang ada, memang dapat ditagih (*collectible*).
3. Untuk menentukan, ketepatan penyajian dan klasifikasi piutang dalam neraca.
4. Untuk menentukan adanya kewajiban bersyarat (*contingent liability*) yang timbul karena pendiskontoan suatu wesel tagih (*notes receivable*)

Berdasarkan tujuan pemeriksaan terhadap piutang, auditor ingin memastikan bahwa piutang yang diperiksa tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Sesuai dengan tujuan pemeriksaan piutang yang pertama, auditor ingin memastikan keabsahan (*validity*) piutang atau kebenaran (*authenticity*) piutang tersebut dan mengetahui bahwa para debitur adalah bonafide.
2. Sesuai dengan tujuan pemeriksaan piutang yang kedua, auditor ingin memastikan bahwa sekalipun debitur itu tidak fiktif tetapi jika piutang darinya tidak dapat ditagih, piutang tersebut sebenarnya dicantumkan terlalu besar (*overstated*) dalam neraca.
3. Sesuai dengan tujuan pemeriksaan piutang yang ketiga, auditor ingin memastikan bahwa piutang yang dicantumkan dalam neraca telah diklasifikasi atau digolongkan sesuai dengan jenis piutang.
4. Sesuai dengan tujuan pemeriksaan piutang yang keempat, auditor ingin mengetahui adanya kewajiban bersyarat dalam pendiskontoan wesel tagih. Seperti diketahui, pemegang terakhir dari suatu wesel dapat menuntut pada penjual wesel sebelumnya kalau yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya.

2.5 Tujuan Pengujian Substantif Terhadap Piutang

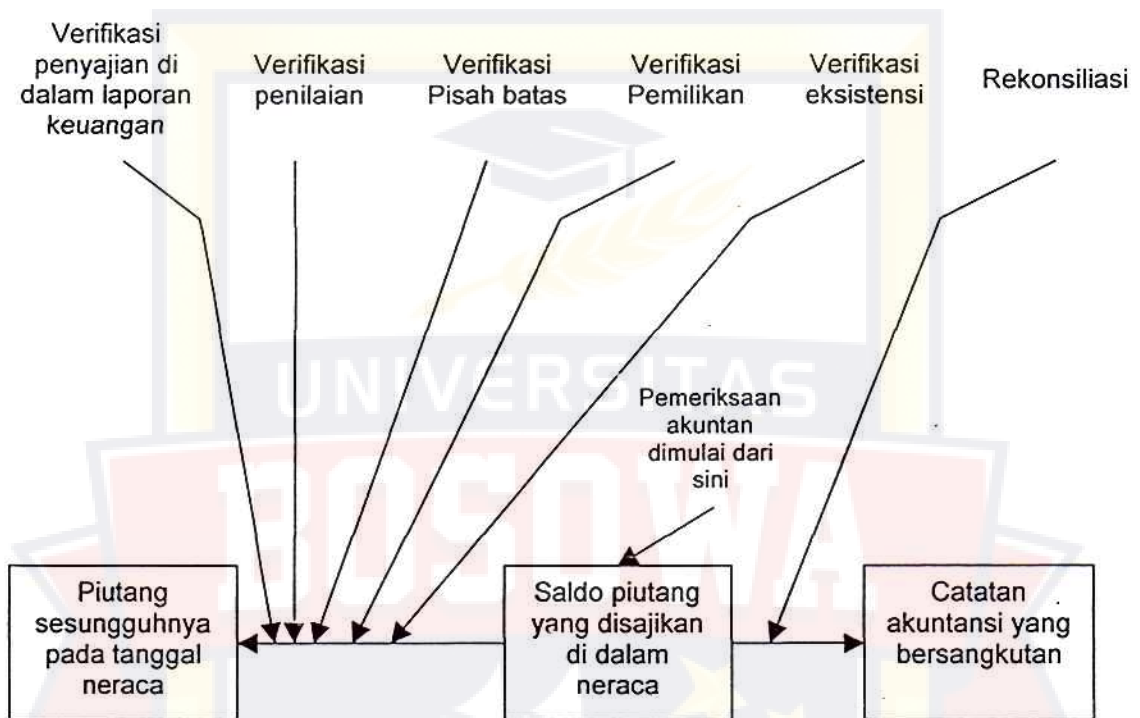
Menurut Mulyadi ada enam tujuan pengujian substantif terhadap piutang yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang.
2. Membuktikan eksistensi piutang yang dicantumkan dalam neraca.
3. Membuktikan hak pemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di dalam neraca.
4. Membuktikan ketepatan pisah batas (*outoff*) transaksi yang bersangkutan dengan piutang.
5. Membuktikan kewajaran penilaian piutang yang dicantumkan di dalam neraca.
6. Membuktikan kewajaran penyajian piutang di dalam neraca.

Dari beberapa tujuan pengujian substantif terhadap piutang dapat dilihat dari pint berikut ini :

1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang.
2. Membuktikan eksistensi piutang yang dicantumkan di dalam neraca.
3. Membuktikan hak pemilikan klien atas piutang yang dicantumkan di dalam neraca.
4. Membuktikan kewajaran penilaian piutang yang dicantumkan di dalam neraca.
5. Membuktikan kewajaran penyajian piutang dalam neraca.

Gambar 2
Kerangka Tujuan Pengujian Substantif
Terhadap Piutang



2.6 Pengertian Program dan Prosedur Pemeriksaan

Pengertian program dan prosedur pemeriksaan menurut Mulyadi adalah sebagai berikut :

“Program pemeriksaan merupakan daftar prosedur pemeriksaan untuk seluruh pemeriksaan unsur tertentu, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti pemeriksaan tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam pemeriksaan. Dalam program pemeriksaan akuntan menyebutkan prosedur pemeriksaan yang harus

diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur pemeriksaan tersebut. Serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan”.

Tuanakota mengemukakan defenisi program pemeriksaan adalah :

“Program pemeriksaan merupakan daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan, program pemeriksaan yang lengkap mempunyai kerangka sebagai berikut :

1. Tujuan Pemeriksaan
2. Penjelasan singkat tentang sistem akuntansi
3. Segi-segi pengendalian intern yang kuat
4. Segi-segi pengendalian intern yang lemah
5. Prosedur pemeriksaan
6. Kesimpulan pemeriksaan
7. Catatan untuk pemeriksaan yang akan datang.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pemeriksaan merupakan bagian dari rencana pemeriksaan yang dibuat untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

2.7 Program Pengujian Substansif Terhadap Piutang

Sebelum menguraikan program substansif terhadap piutang, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai pentingnya sistem pengendalian intern dan penilaian pengendalian intern piutang.

Struktur pengendalian intern yang digunakan dalam perusahaan merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, sebelum akuntan melaksanakan pemeriksaan secara mendalam terhadap informasi yang tercantum dalam laporan keuangan ia harus memahami struktur pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan.

Pentingnya sistem pengendalian intern, sejalan dengan semakin luasnya aktivitas perusahaan, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi pimpinan dalam mengendalikan setiap aktivitas maka kehadiran sistem pengendalian intern di perusahaan mutlak dimiliki.

Mulyadi memberikan definisi mengenai struktur pengendalian intern:

“Struktur pengendalian intern suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai”.

Abdul Halim mengemukakan konsep mengenai pengendalian intern sebagai berikut :

“Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberi keyakinan (*assurance*) yang memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai”.

a. Prosedur

Pertama harus ada prosedur tertentu dan prosedur ini harus dijalankan. Prosedur yang telah ditentukan tapi tidak dijalankan sebenarnya tidak mempunyai arti

apa-apa dari segi pengendalian. Perhatian bukan saja harus diberikan kepada apa yang telah direncanakan, tetapi juga pada pelaksanaan rencana tersebut.

b. Pelaksana

Syarat kedua adalah bahwa prosedur yang telah ditetapkan itu dilaksanakan oleh orang-orang yang cakap (kompeten). Kecakapan meliputi kombinasi dari keahlian, pengetahuan, ketelitian dan adanya wewenang yang cukup.

c. Pemisahan tugas

Pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan oleh orang yang kompeten saja tidaklah cukup. Jika seseorang menjalankan beberapa prosedur yang satu sama lainnya bertentangan, sistem pengendalian intern tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Contoh : seorang kasir yang juga menjalankan tugas pembukuan atau pemeriksaan kas dapat meneruskan menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan tanpa diketahui.

Menurut Mulyadi hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian intern menentukan juga luasnya pemeriksaan yang akan dilaksanakan yaitu dalam hal :

1. Pemilihan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan dalam pemeriksaan .
2. Pemilihan saat penerapan prosedur pemeriksaan tersebut, yaitu apakah diterapkan sebelum tanggal laporan keuangan atau sesudahnya.
3. Penentuan jumlah pengujian yang diperlukan untuk mendukung pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diperiksa.

2.8 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Piutang

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa prosedur pemeriksaan merupakan bagian dari program pemeriksaan yang menggambarkan bahwa program pemeriksaan yang disiapkan telah dilaksanakan.

Dengan berdasar pada program pemeriksaan, dapat ditentukan langkah-langkah yang dilakukan di dalam sehingga tujuan pemeriksaan tersebut dapat tercapai.

Setiap langkah prosedur pemeriksaan harus diarahkan kepada cara yang efisien, sehingga diperoleh informasi yang cukup untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan dan kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang lazim.

Dalam pembahasan prosedur pemeriksaan ini, penulis akan bertitik tolak dari program pemeriksaan yang dikemukakan oleh Mulyadi sebagai berikut :

a. *Rekonsiliasi*

Rekonsiliasi ini penting untuk dilakukan agar akuntan memperoleh keyakinan bahwa informasi piutang yang dicantumkan di dalam neraca didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya.

b. *Verifikasi Eksistensi*

Eksistensi piutang yang dicantumkan di dalam neraca dibuktikan oleh akuntan dengan mengirimkan surat konfirmasi kreditur. Serta memeriksa dokumen yang mendukung pencatatan pemeriksaan kas dari debitur yang terjadi setelah tanggal neraca.

c. Verifikasi Pemilikan

Piutang dagang yang dicantumkan di neraca perlu diverifikasi hak pemilikannya, untuk memverifikasihak pemilikan klien terhadap piutang dagang yang disajikan dalam neraca akuntan melakukan tiga prosedur pemeriksaan berikut ini :

- Pemeriksaan dokumen pendukung timbulnya piutang
- Periksa jawaban konfirmasi bank
- Mintalah surat representasi piutang dari klien

d. Verifikasi Pisah Batas (Outoff)

Verifikasi pisah batas dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi penjualan yang termasuk dalam tahun yang diperiksa dibanding dengan tahun sebelumnya.

e. Verifikasi Penilaian

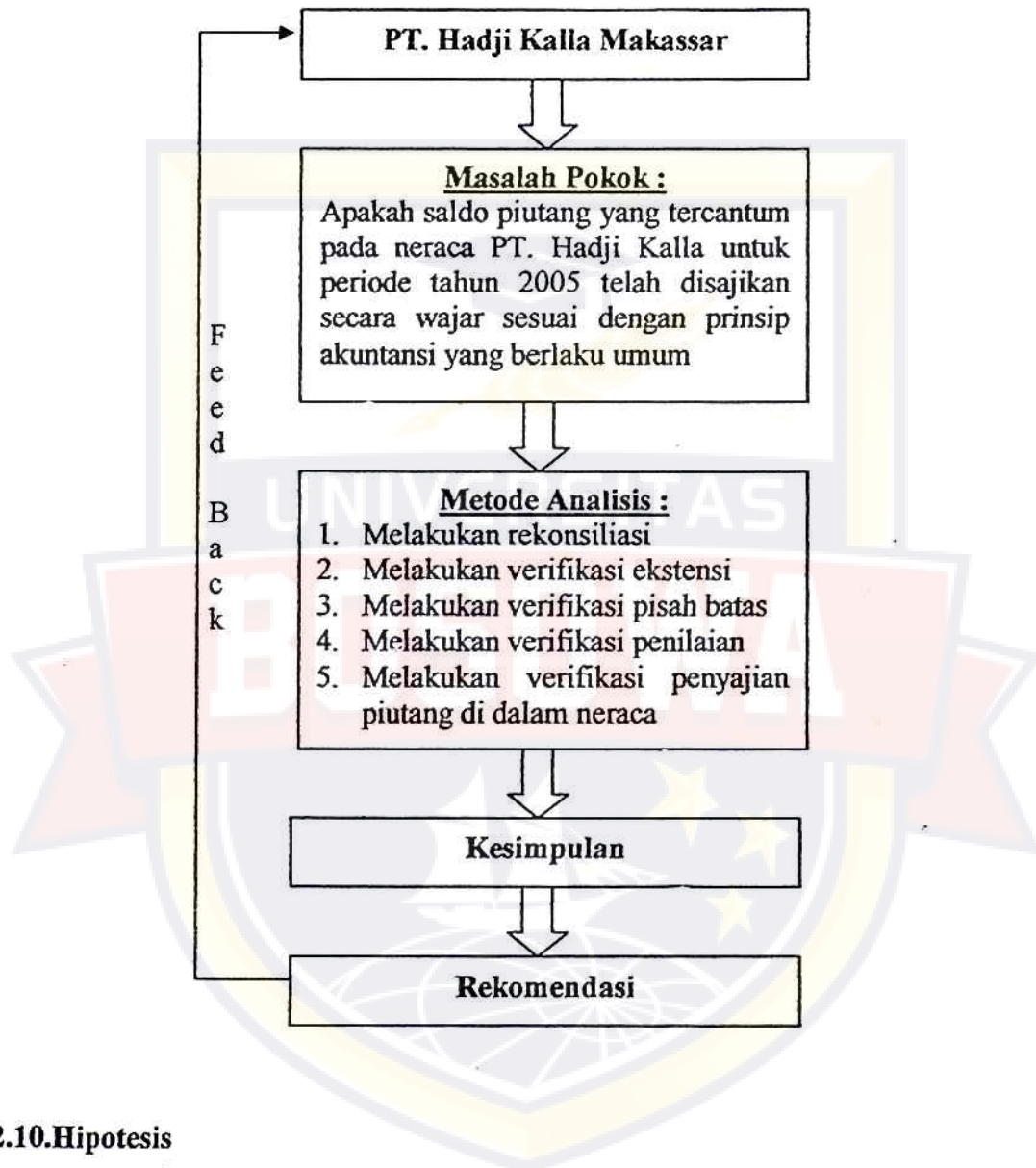
Menurut prinsip akuntansi yang lazim, piutang dagang harus disajikan di dalam neraca sebesar nilainya yang diperkirakan akan ditagih dari debitur.

f. Verifikasi Penyajian Piutang di Dalam Neraca

Dalam verifikasi penyajian piutang di dalam neraca akuntan melakukan prosedur pemeriksaan berikut ini.

- Pemeriksaan klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.
- Periksa jawaban konfirmasi dari bank
- Periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang dagang dan piutang non dagang.

2.9. Kerangka Pikir



2.10. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang ada maka hipotesis yang diajukan adalah :
 “Diduga saldo piutang yang tercantum pada neraca PT. Hadji Kalla untuk periode tahun 2005 belum disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum”.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan persiapan data yaitu dengan mengadakan pengamatan ke perusahaan dan interview dengan direktur perusahaan kepala bagian akuntansi, pemasaran dan keuangan beserta sifatnya

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Data Primer

Untuk pengumpulan data primer, penulis melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian yaitu dengan jalan :

- Wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan dan pejabat berwenang dengan masalah yang diteliti.
- Mengamati secara langsung dan mempelajari dokumen-dokumen, formulir-formulir serta pencatatan-pencatatan lainnya yang dimiliki PT. "HJKL" yang menyangkut materi penulisan skripsi.
- Membaca dan memahami literatur-literatur mengenai pengujian substansif yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3.3 Metode Analisis

Untuk memecahkan pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya penulis menggunakan analisis sebagai berikut :

- a. Melakukan rekonsiliasi dengan cara :
 - Mengusut saldo piutang yang tercantum di dalam neraca saldo rekening yang bersangkutan di dalam buku besar.
 - Menghitung kembali saldo, rekening piutang di dalam buku besar.
 - Mendapatkan data umur piutang dari bagian piutang
 - Usut posting pendebitan rekening piutang ke dalam jurnal yang bersangkutan
- b. Melakukan verifikasi eksistensi dengan cara :
 - Memeriksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang
- c. Melakukan verifikasi pisah batas (*cut off*)
 - Periksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang dalam minggu terakhir tahun diperiksa dan minggu pertama setelah tanggal neraca.
 - Periksa dokumen yang mendukung berkurangnya piutang dalam minggu terakhir tahun yang diperiksa dan minggu pertama setelah tanggal neraca.
- d. Melakukan verifikasi penilaian dengan cara :
 - Menghitung kembali cadangan kerugian piutang yang dibuat oleh klien
 - Periksa penentuan umur piutang yang dibuat klien
- e. Melakukan verifikasi penyajian piutang di dalam neraca dengan cara :
 - Periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva
 - Periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang dagang dan piutang non dagang.

PT. ABC
Taksiran Kerugian Piutang (*Aging Schedule*)
Per 31 Desember 2000

Kelompok Umur	Saldo	Persentase Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Menunggak 1-30 hari	Rp. 1.840.000	1%	Rp. 18.400
Menunggak 31-60 hari	Rp. 925.000	3%	Rp. 27.750
Menunggak 61-90 hari	-	5%	-
Menunggak 91-120 hari	-	10%	-
Menunggak 21-180 hari	Rp. 50.000	15%	Rp. 7.500
Menunggak 181-365 hari	Rp. 135.000	20%	Rp. 27.000
Menunggak > 365 hari	Rp. 125.000	50%	Rp. 62.500
Jumlah	Rp. 3.075.000		Rp. 143.150

PT. ABC
Analisa Umur Piutang
Per 31 Desember 2000

No	Nama Pelanggan	Umur Piutang (hari)							Jumlah
		1-30	31-60	61-90	91-120	121-180	181-365	> 365	
1	PT. Agung Jaya	500	250						750
2	PT. Abadi	1.000							1.000
3	PT. Pelita	340				50			390
4	PT. Maju		675					25	700
5	PT. Kurnia						135	100	235
	Total	1.840	925			50	135	125	3.075

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Awal pendirian perusahaan PT. HJKL di Makassar ditandai dengan keadaan perekonomian di Indonesia yang belum menentu akibat guncangan sosial politik. Tetapi berkat keuletan dapat kerja keras yang disertai jiwa wiraswasta serta melihat peluang dimasa depan, keadaan di atas tidak membuat mundur seorang pengusaha putra daerah Sulawesi Selatan untuk terus mengembangkan usahanya dalam bidang perekonomian.

Pada awalnya perusahaan ini dimulai pada bidang perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, hasil bumi dan bahan bangunan di Kota Watampone dan Makassar. Dengan dikeluarkan akte notaris tertanggal 18 Oktober 1952 No. 31 oleh Meester Jan Philippus dengan Korte yang bertindak sebagai pengganti Burno Ernst, Dirtsz, berdasarkan Bisluit Menteri Djustisi tertanggal 17 Oktober 1950 No.JP.21/29/16, perusahaan PT. HJKL resmi berdiri di Makassar dengan modal pertama sebesar Rp. 2.500.000,- yang terpecah menjadi 2.500 lembar saham yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,-. Naskah pendirian tersebut kemudian diperbaiki kembali dengan akte No. 36 tertanggal 16 Maret 1953 oleh notaris yang sama. Sebagai pengesahan pemerintah Menteri Kehakiman RI mengeluarkan surat No. Y.A.5/28/4 tertanggal 27 Maret 1953. Dengan kedua kelengkapan inilah perusahaan PT HJKL memulai aktivitasnya

Pada tahun 60-an perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan perdagangan umum yang meliputi perdagangan ban mobil, sepeda dan alat-alat tenun. Perkembangan ini berjalan terus hingga pada tahun 1964 dimana perusahaan ini memulai perdagangan kendaraan bermotor merek Toyota Astra yang selanjutnya pada tahun 1968 telah pula menangani penjualan merek Daihatsu. Penunjukan sebagai dealer PT. Toyota Astra Motor (TAM) pada tahun 1973 menjadikan perusahaan ini mengkhususkan diri pada penjualan kendaraan bermotor merek Toyota serta suku cadangnya. Sedangkan daerah pemasarannya meliputi daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Pada bulan September 1982 perusahaan mengalami perubahan modal, anggaran dasar, susunan struktur organisasi dan perubahan pucuk pimpinan. Perubahan ini merupakan dari pelebaran sayap perusahaan melalui beberapa anak perusahaan. Sedangkan perusahaan PT. HJKL mengkonsentrasikan kegiatannya di bidang keagenan dan dealer serta pengangkutan darat. Di bidang keagenan dan dealer PT. HJKL untuk memasarkan beberapa jenis barang dagang seperti :

1. Kendaraan merek Toyota dan suku cadangnya
2. Bahan-bahan pelumas dan handling aspal dari Pertamina

Penyebaran atau pemasaran barang-barang tersebut dilakukan melalui beberapa kantor cabang dan perwakilan di beberapa ibukota propinsi dan kabupaten.

3.2 Struktur Organisasi

Dengan melihat lebih mendalam lagi suatu perusahaan, anatomi suatu usaha akan kita temukan. Anatomi tersebut tidak lain adalah suatu kerangka sebagaimana di dalam tubuh kita terdapat pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dan lain-lain sebagainya yang lebih lazim dinamakan struktur organisasi. Jadi baik tidaknya suatu perusahaan salah satu indikatornya adalah baik tidaknya kerangka atau struktur organisasinya. Bentuk struktur organisasi dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu organisasi lini, organisasi fungsional serta organisasi lini staf.

Dari ketiga bentuk organisasi di atas, perusahaan PT. HJKL menganut bentuk lini dan staf. Komponen-komponen yang ada di dalamnya terdiri dari komisaris, direksi, staf direksi dan beberapa divisi yang diuraikan menjadi komponen lini dan komponen staf.

Sistematika dari komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut :

Perusahaan PT. HJKL dipimpin oleh direktur utama yang merupakan anggota aktif dan dipercayakan oleh dewan komisaris untuk memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terhadap perusahaan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya direktur utama dibantu oleh staf yaitu internal audit, sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada direktur.

Direktur pemasaran dan direktur keuangan, umum dan personalia yang bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan dibantu oleh sekretaris membawahi enam divisi yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer

divisi. Selanjutnya divisi-divisi ini membawahi beberapa departemen masing-masing adalah :

- a. Divisi administrasi umum dan personalia membawahi dua departemen
 1. Departemen personalia / PSDM
 2. Departemen administrasi/Humas
- b. Divisi finance controller membawahi satu departemen
 1. Departemen akuntansi
- c. Divisi keuangan membawahi dua departemen
 1. Departemen keuangan
 2. Departemen kredit
- d. Divisi Toyota dibantu oleh seorang Customer Service dan membawahi tiga departemen
 1. Departemen Toyota Sales
 2. Departemen Toyota Part
 3. Departemen Service
- e. Departemen perdagangan umum membawahi
 1. Departemen ekspor impor
 2. Administratur
- f. Divisi perdagangan aspal membawahi dua departemen :
 1. Departemen pemasaran
 2. Departemen administrasi piutang

Adapun tugas dan susunan masing-masing personil dari perusahaan PT. HJKL dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Direktur Utama

- Memimpin dan menentukan kebijaksanaan (*policy*) tata tertib perusahaan.
- Mengurus dan menjaga perusahaan, menetapkan tata tertib serta cara menjalankan perusahaan.
- Mengusahakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah serta masyarakat setempat.
- Mengusahakan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan perusahaan
- Membuat kebijaksanaan perusahaan mengenai pemasaran dan penjualan mobil yang akan dijual.

2. Internal Audit

- Membantu manajemen dalam penentuan standar dan keinginan untuk mengulur ketetapan dan rencana kegiatan.
- Membantu dan meninjau sistem pengendalian intern dan membantu melindungi harta milik perusahaan.
- Memimpin dan mengadakan pemeriksaan (audit) secara sistematis, melaporkan kesimpulan dan rekomendasi kepada manajemen (direktur).

3. Sekretaris Perusahaan

- Bertanggung jawab atas segala izin yang menyangkut perusahaan
- Mengambil alih semua pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh divisi lain.

- Mengatur jadwal direktur utama, termasuk tamu-tamu dan karyawan yang harus diterima direktur.
- Menginformasikan ke direktur tentang waktu, tanggal dan hari-hari dari undangan pertemuan, seminar, diskusi dan lain-lain baik intern maupun eksteren.

4. Manajer Administrasi Umum dan Personalia

- Bertanggung jawab penuh terhadap segala tugas dan kewajiban divisi
- Mengkoordinasikan, mengawasi, memimpin dan bertanggung atas kelancaran pekerjaan bagian-bagian dibawah lingkungannya.
- Membuat suatu sistem pengarsipan surat-surat yang lebih baik, memudahkan mendapatkan informasi, baik yang lalu maupun yang baru diperoleh.

5. Manajer Divisi Financial Controller

- Membantu manajemen dan divisi lain dalam perencanaan keuangan
- Membantu manajemen dalam penentuan tujuan/sasaran perusahaan dan dalam memperbaiki kondisi perusahaan serta rencana lainnya yang sifatnya menyeluruh.

6. Manajer Divisi Keuangan

- Membuat laporan keuangan yang tepat pada waktunya sesuai dengan permintaan direktur.
- Membantu direktur dalam menentukan kebijaksanaan keuangan dan administrasi termasuk menyiapkan rencana anggaran periodik.

7. Manajer Divisi Toyota

- Bertanggung jawab pada direktur dalam hal tugas perencanaan, pemasaran, penjual, penyediaan dan menjalankan misi penjualan secara umum.
- Berupaya mensukseskan/memberikan laba yang besar dapat mencapai pembeli yang sebanyak-banyaknya.
- Memelihara langganan (costumed station), karena hampir semua pembeli adalah berulang.
- Membantu direktur dalam menetapkan harga jual, dan mengatur semua kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas penjualan, baik suku cadang maupun kendaraan termasuk upaya peningkatan service/daftar sales service.
- Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua dealer khususnya PT. Toyota sendiri.

8. Manajer Divisi Perdagangan Umum

Tugas utama manajer ini adalah meningkatkan penjualan dan mencari pasar baru, sebagai tugas dan tambahan adalah :

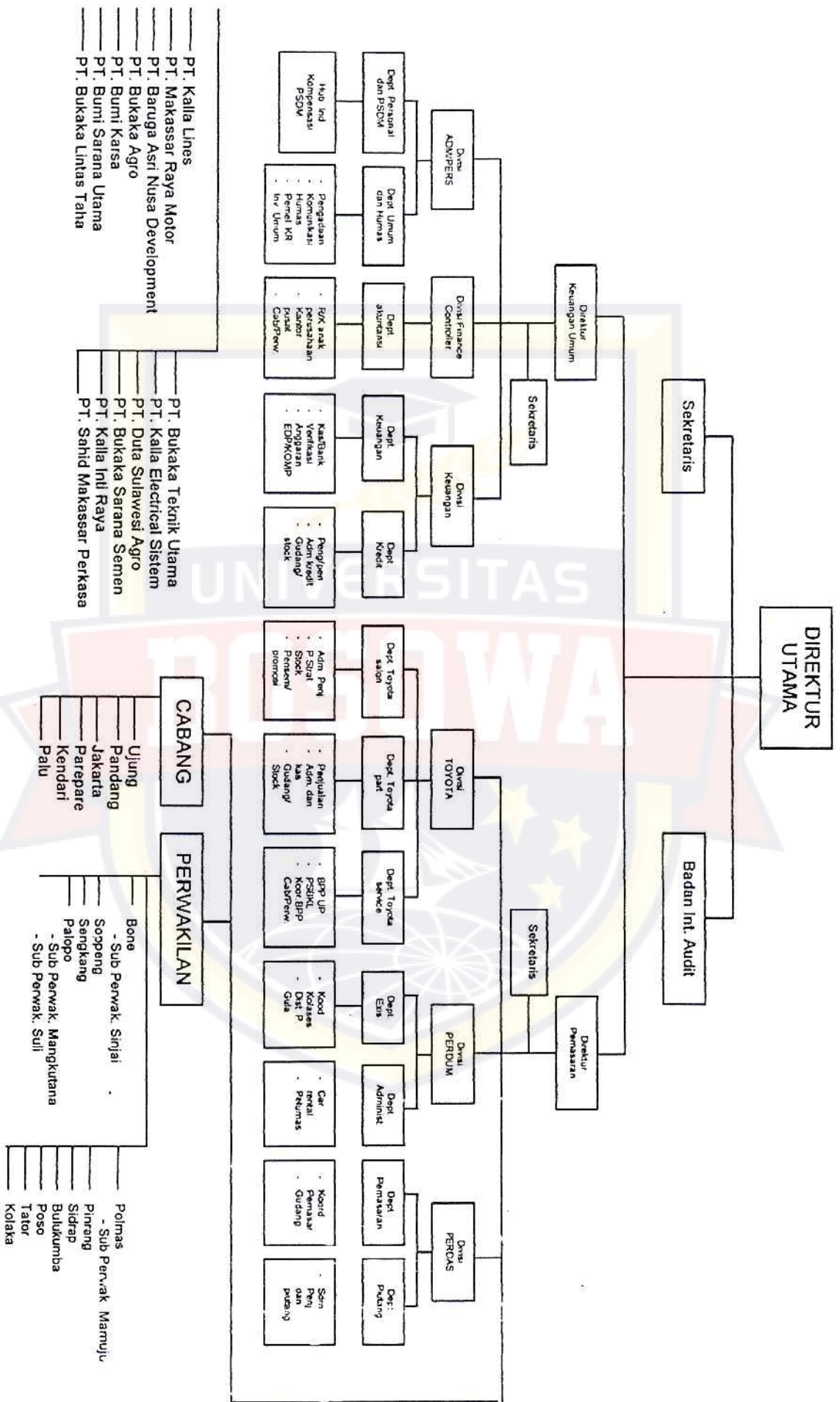
- Mengatur dan menetapkan rencana promosi
- Memperbaiki dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perorangan.
- Mengadakan penelitian dan pencatatan mengenai perkembangan perekonomian khususnya yang menjadi kegiatannya

9. Manajer Divisi Perdagangan Aspal

Tugas utama manajer divisi perdagangan aspal tidak jauh berbeda dengan tugas dari manajer perdagangan umum.

Uraian-uraian struktur organisasi di atas digambarkan dalam gambar 3 pada halaman berikut :

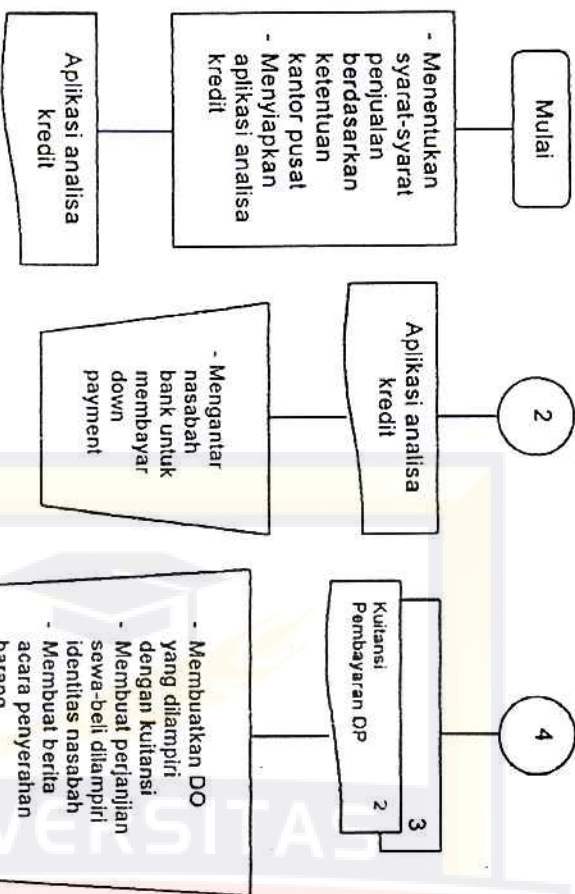




Sumber : Laporan Hasil Raker Tahun 2005
Departemen Personal dan PSDH

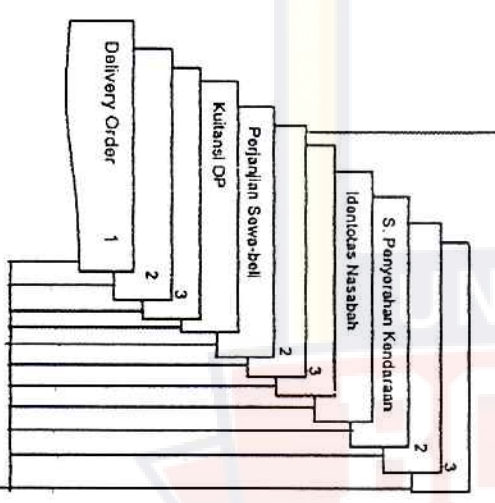
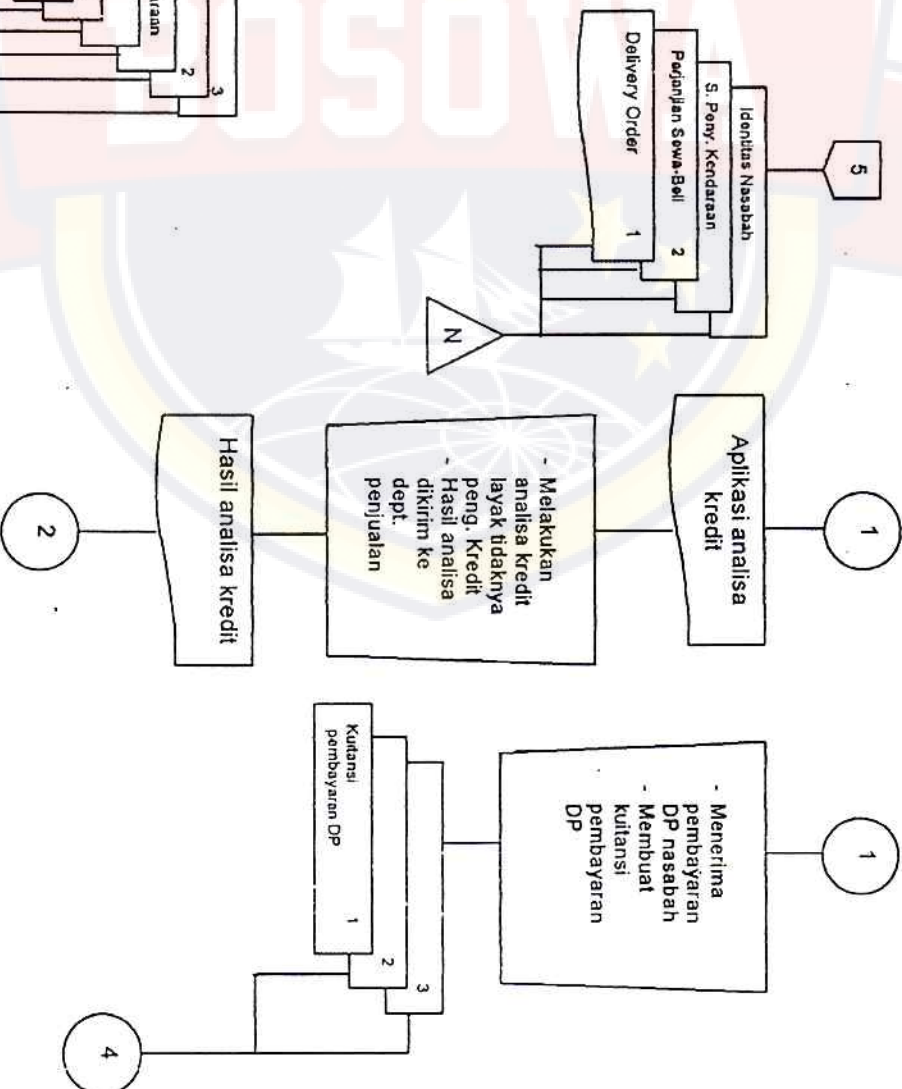
**Prosedur Penjualan Mobil Secara Kredit
PT. Hadji Kalla Trd. Coy**

Departemen Penjualan

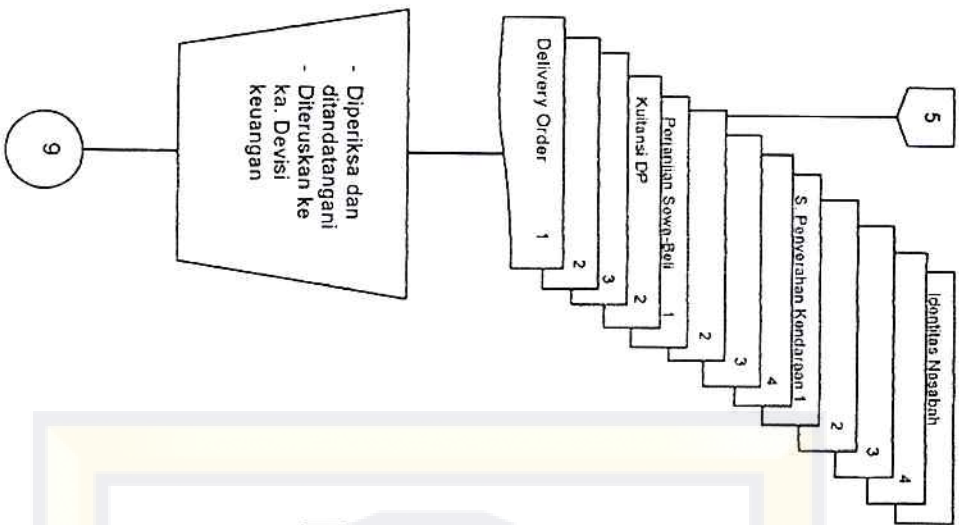


Departemen Kredit

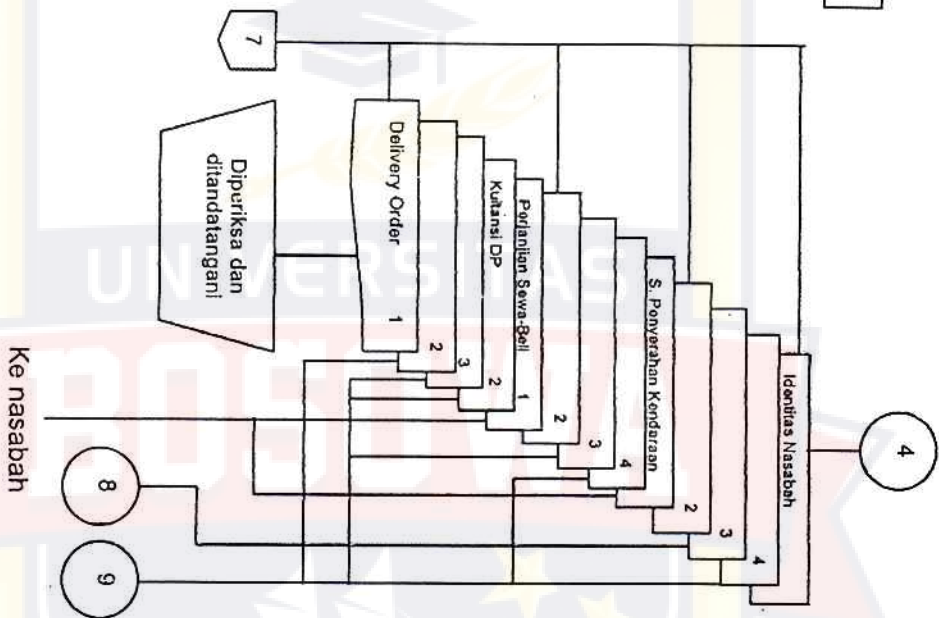
Kasir



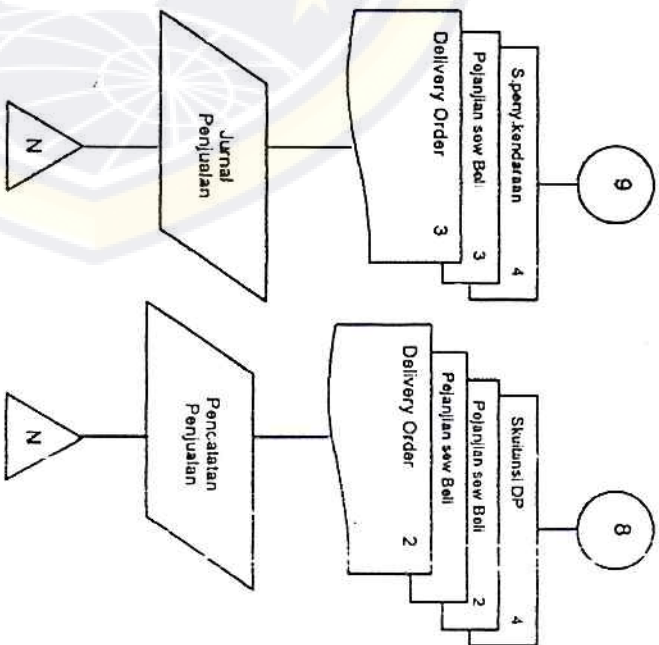
Kepala Divisi Toyota



Kepala Divisi Keuangan



EDP



3.3 Sistem Penjualan

Sistem penjualan yang diterapkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Semua penjualan harus sesuai daftar harga dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, apabila ada penyimpangan harus ada persetujuan dari direktur.
2. Untuk penjualan mobil semua order harus diperiksa oleh bagian kredit dan disetujui oleh kepala divisi keuangan.
3. Faktur penjualan ditandatangani oleh kepala divisi keuangan.

Untuk penjualan kredit ini PT. HJKL menetapkan kebijakan pelunasan dengan jangka waktu 2 tahun dengan persyaratan membayar down payment 30% dari harga penjualan. Untuk jangka waktu pelunasan kredit tersebut dibebankan bunga kepada pembeli/nasabah, adapun ketentuan bunga ini adalah sebagai berikut

Sisa angsuran x Bunga per bulan x Jangka waktu pelunasan

Contoh :

Sisa angsuran = Rp. 30.000.000,-

Beban bunga perbulan = 1,25 %

Jangka waktu pelunasan = 24 bulan

Maka jumlah beban selama 24 bulan adalah

Rp. 30.000.000,- x 1,25 % x 24 bulan = Rp. 9.000.000,-

Dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah/pembeli setiap bulan adalah :

$$\left(\frac{Rp. 30.000.000}{24} \right) + \left(\frac{Rp. 9.000.000}{24} \right) = Rp. 11.625.000$$

3.4 Prosedur Pencatatan Piutang

Dalam prosedur pencatatan piutang yang dilaksanakan oleh PT. HJKL adalah sebagai berikut :

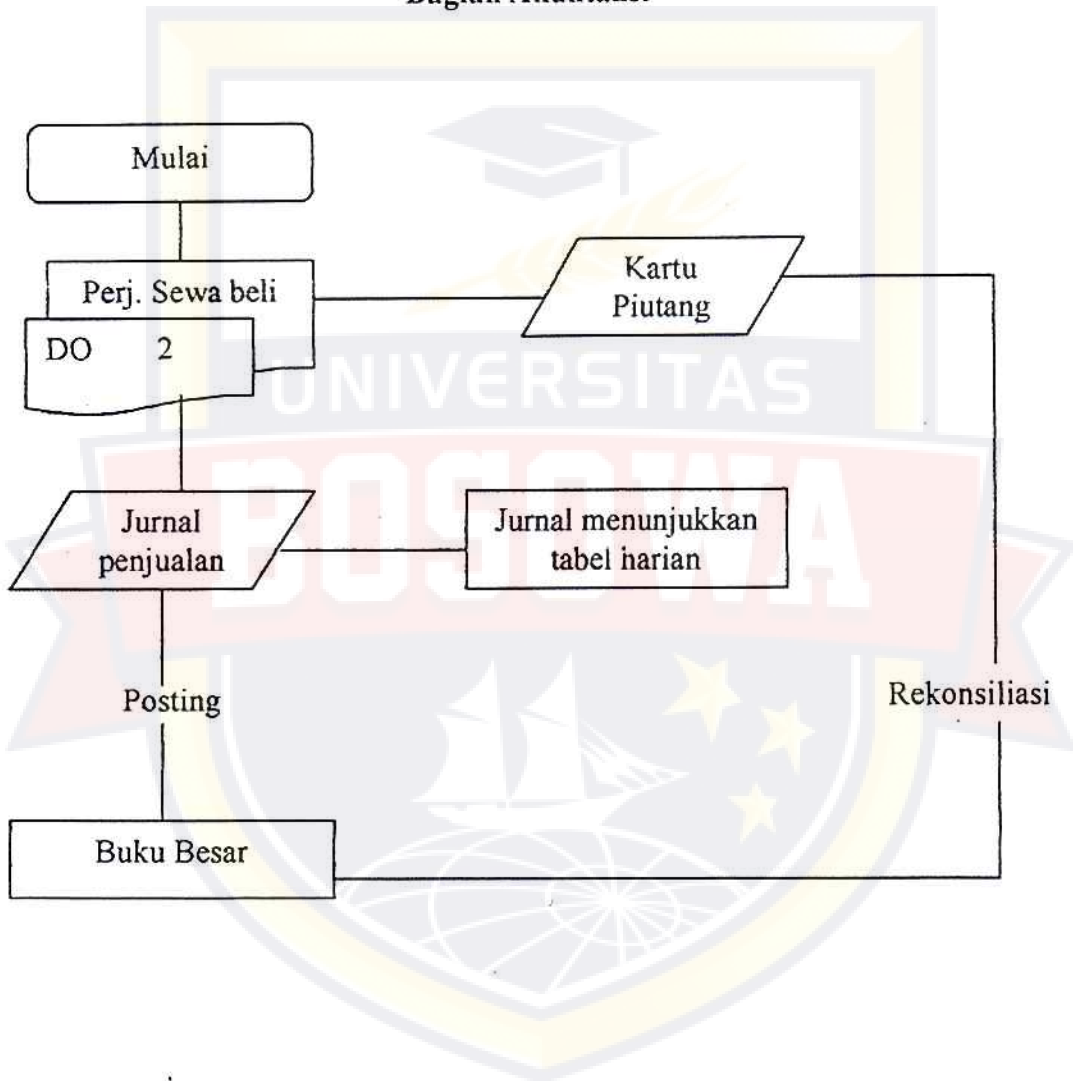
1. Bagian akuntansi menggunakan Delivery Order dan perjanjian sewa beli yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang.
2. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjual harian yang merupakan jumlah DO selama sehari.

Tetapi sebelumnya bagian akuntansi mencocokkan jumlah down payment yang dibayar nasabah yang tertera kwitansi pembayaran dengan jumlah yang tercantum dalam lampiran penjualan sewa-beli.

3. Sisa harga antara total harga dengan down payment penjualan diakui oleh bagian akuntansi sebagai piutang dagang.
4. Selanjutnya setiap bulan jurnal penjualan tersebut diposting ke buku besar.

Gambar 5
Bagan Alur (Flow Chart)
Prosedur Pencatatan Piutang
PT. HJKL

Bagian Akuntansi



TABEL
DAFTAR PENJUALAN MOBIL TAHUN 2005

NO.	BULAN	TOTAL (Rp)	TUNAI (Rp)	KREDIT (Rp)
1.	Januari	62.495.182.367	43.746.627.657	18.748.554.710
2.	Februari	60.773.812.317	42.541.668.622	18.232.142.695
3.	Maret	65.496.593.059	45.847.615.442	19.648.977.917
4.	April	61.895.181.180	43.326.626.826	18.568.554.354
5.	Mei	68.452.745.864	47.916.922.105	20.535.823.759
6.	Juni	66.451.073.091	46.515.751.164	19.935.321.927
7.	Juli	59.804.760.908	41.863.332.636	17.941.428.272
8.	Agustus	7.541.661.138	47.279.162.797	20.262.498.341
9.	September	78.941.234.735	55.258.864.315	23.682.370.420
10.	Oktober	45.180.465.911	31.626.396.138	13.554.169.773
11.	November	44.787.225.037	31.351.057.526	13.436.167.511
12.	Desember	60.995.584.772	42.696.909.341	18.298.675.431
		742.815.620.679	519.970.934.569	222.844.686.110

Secara komulatif dalam proses kronologis pencatatan akuntansi piutang usaha di atas, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat dilihat dalam table berikut :

TABEL
REKAP MUTASI PIUTANG USAHA
Periode 31 Desember 2005

NO.	BULAN	PENJUALAN KREDIT (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH PIUTANG (Rp)
1.	Januari	18.748.554.710	3.749.710.943	14.998.843.768
2.	Februari	18.232.143.695	3.646.28.740	14.585.714.956
3.	Maret	19.648.977.917	3.929.795.580	15.719.182.334
4.	April	18.568.554.354	3.713.710.870	14.854.834.483
5.	Mei	20.535.823.759	4.107.164.750	16.428.659.007
6.	Juni	19.935.321.927	3.987.064.380	15.948.257.541
7.	Juli	17.941.428.272	3.588.285.660	14.353.142.617
8.	Agustus	20.264.498.341	4.052.499.670	16.209.998.673
9.	September	23.682.370.420	4.736.474.090	18.945.896.336
10.	Oktober	13.554.169.773	2.710.833.960	10.843.335.818
11.	November	13.436.167.511	2.687.233.510	10.748.934.008
12	Desember	18.298.675.431	3.659.735.090	14.638.940.345
		222.844.684.110	44.568.937.243	178.275.748.866

TABEL
PT. HADJI KALLA MAKASSAR
TAKSIRAN KERUGIAN PIUTANG (AGING SCHEDULE)
Periode 31 Desember 2005

Kelompok Umur	Jumlah (Rp)	Persentase Kerugian Piutang	Taksiran Kerugian Piutang (Rp)
Belum menunggak	-	0%	-
Menunggak 31-60 hari	18.146.810.883	2%	362.936.217
Menunggak 61-90hari	55.620.696.778	5%	2.781.034.838
Menunggak 91-120 hari	55.620.696.778	7%	3.547.055.455
Menunggak 121-150 hari	13.719.182.334	10%	1.371.918.233
Menunggak 151-180 hari	17.193.433.078	15%	2.579.014.961
Menunggak 181-270 hari	8.640.054.000	18%	1.55.209.720
Menunggak 271-1 tahun	12.082.132.804	22%	2.658.069.216
Diatas 1 tahun	2.201.218.200	27%	594.328.914
Jumlah	178.275.748.866		15.449.567.554

Sumber : PT. Hadji Kalla Makassar, Hasil Olahan Data

BAB V

PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS SALDO PIUTANG DAGANG

PT. HJKL MAKASSAR

5.1 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan akuntan atas piutang adalah mencari bukti-bukti yang kompeten untuk memberikan pendapatnya bahwa :

- Pengendalian intern perusahaan dalam mengendalikan piutang dagang memadai atau tidak.
- Perusahaan bersangkutan telah menerapkan standar akuntansi keuangan dalam menyajikan piutang dagang yang tercantum pada neraca.
- Piutang yang tercantum dalam neraca telah disajikan dan digolongkan dengan benar.

Tujuan ini bukan merupakan keseluruhan tujuan, tetapi merupakan tujuan pemeriksaan yang umum dipakai dalam pemeriksaan terhadap piutang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, sangat ditentukan oleh prosedur berikut ini :

A. Prosedur Analitik Berdasarkan Tujuan Pemeriksaan

Prosedur analitik dilakukan sebagai salah satu pengujian substantif untuk menghimpun bahan bukti tentang asersi tertentu yang terkait dengan saldo rekening ataupun kelompok transaksi.

Adapun langkah-langkah prosedur analitik yang dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat

2. Melakukan perhitungan dan perbandingan
3. Menganalisis data
4. Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan

B. Pengujian Kepatuhan Berdasarkan Tujuan Pemeriksaan

Dalam pengujian kepatuhan terhadap pengendalian interan, akuntansi tidak hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur pengendalian intern, namun akuntan juga berkepentingan terhadap tingkat kepatuhan klien terhadap pengendalian interan piutang. Akuntan dapat menempuh prosedur pemeriksaan berikut ini :

- Mengambil sampel bukti penjualan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukungnya (surat order pengiriman, laporan pengeluaran barang, faktur penjualan) serta tanda tangan pejabat yang berwenang baik dalam bukti penjualan maupun dokumen pendukungnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk mendapatkan kepastian transaksi penjualan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

Tabel
PT HJKL
Daftar Piutang Tipe Kijang
Per 31 Desember 2005

NO	NAMA DEBITUR		JUMLAH
1	PNE	Ø	38,368,050
2	HRD	Ø	49,972,300
3	SHB	Ø	44,478,700
4	HYT	Ø	73,908,450
5	MND	Ø	25,084,952
6	SRJ	Ø	37,037,700
7	RGB	Ø	20,524,525
8	HNH	Ø	44,478,700
9	KMW	Ø	29,652,466.67
10	SMS	Ø	35,414,050
11	SYR	Ø	27,743,700
12	MNL	Ø	30,373,933
13	MSM	Ø	76,736,100
14	HLN	Ø	73,908,450
15	FJR	Ø	46,348,050
16	ADR	Ø	11,586,912.50
17	MLS	Ø	18,039,350
18	ANT	Ø	41,223,700
19	RSD	Ø	30,358,212
20	RML	Ø	29,582,700
21	YLB	Ø	13,550,000
22	AGS	Ø	40,188,600
23	ANL	Ø	44,478,700
24	NTL	Ø	24,636,150
25	RSL	Ø	33,135,197
26	ARF	Ø	36,078,650
27	ASP	Ø	29,652,466.67
28	ZLD	Ø	22,549,187.30
29	AZW	Ø	40,104,050
30	RZK	Ø	24,636,150
31	SDA	Ø	27,037,700
32	RSN	Ø	15,432,375
33	RNN	Ø	25,117,875
34	AND	Ø	38,638,050
35	ABD	Ø	56,087,400
36	HRL	Ø	15,039,018.75
37	MRY	Ø	74,075,400
38	MRY	Ø	9,447,900
39	RAR	Ø	13,280,268.74
40	DAN	Ø	20,611,850
41	MHM	Ø	9,664,666.67
42	ANT	Ø	17,450,606.25
43	SYK	Ø	25,105,193.75
44	SFJ	Ø	35,429,625

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH
45	NFD	Ø 49,383,600
46	JSM	Ø 44,478,700
47	BJR	Ø 36,078,700
48	VKV	Ø 38,368,050
49	SHW	Ø 42,673,050
50	YSR	Ø 9,447,200
51	R.M	Ø 40,104,040
52	A.M	Ø 38,623,375
53	FRD	Ø 27,036,362.50
54	SN	Ø 23,174,025
55	A.R	Ø 85,346,100
56	M.S	Ø 33,118,050
57	ASL	Ø 49,677,075
58	SBH	Ø 55,196,750
59	M.R	Ø 22,078,700
60	ZBD	Ø 44,478,700
61	ALD	Ø 11,119,675.02
62	TD	Ø 36,078,700
63	ARL	Ø 43,253,700
64	MRL	Ø 18,022,375
65	FRM	Ø 12,615,663
66	A.D	Ø 24,636,149
67	BDM	Ø 37,037,700
68	ICR	Ø 41,049,050
69	NRL	Ø 17,707,025
70	ARD	Ø 42,625,421
Jumlah		2,399,656,016.82

Sumber : PT HJKL

- | Ø Telah ditelusuri ke kartu piutang
- Λ Footing

Tabel
PT HJKL
Daftar Piutang Tipe Sedan
Per 31 Desember 2005

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH
1	ACK	Ø 43,892,450
2	AER	Ø 29,261,633.84
3	AND	Ø 76,896,400
4	AJL	Ø 48,060,250.03
5	BM	Ø 72,086,875
6	DJ	Ø 173,008,500
7	ALW	Ø 90,085,450
8	SGI	Ø 142,243,500
9	THG	Ø 76,446,400
10	JLR	Ø 90,085,450
11	SK	Ø 37,535,604
12	MIK	Ø 63,932,400
13	AWY	Ø 39,957,750
14	AHI	Ø 59,676,400
15	HMB	Ø 44,172,450
16	KA	Ø 11,043,112.5
17	Y.HI	Ø 27,512,100
18	AND	Ø 89,735,050
19	F.H	Ø 64,282,400
20	Y.L	Ø 40,176,500
21	Z.B	Ø 67,502,400
22	A.KP	Ø 28,126,000
Jumlah		1,415,719,075

Sumber : PT HJKL

- Ø Telah ditelusuri ke kartu piutang
- Λ Footing

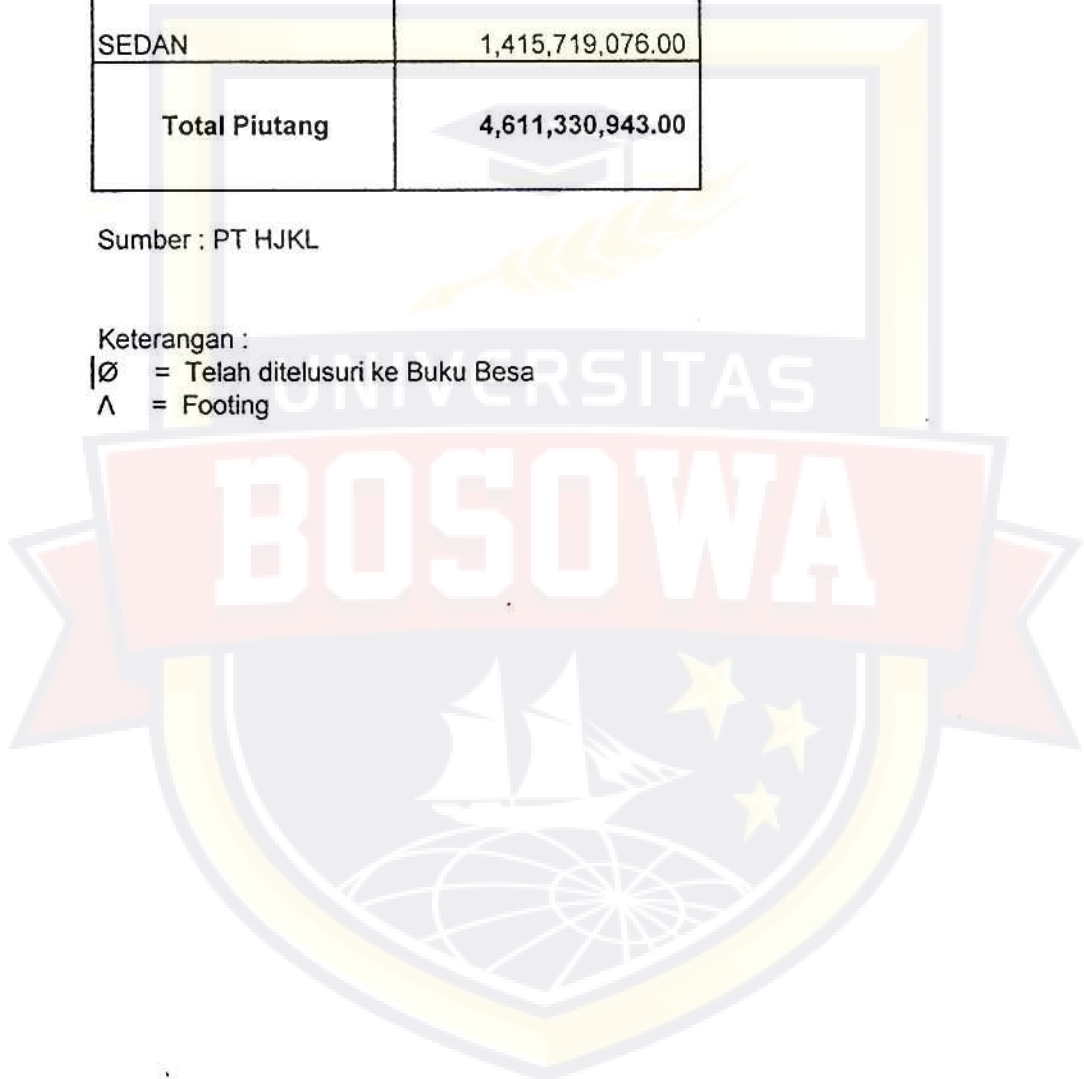
PT HJKL
Jumlah Piutang Dagang
Per 31 Desember 2005

Type Kendaraan	Jumlah Piutang
KIJANG	3,195,611,867.00
SEDAN	1,415,719,076.00
Total Piutang	4,611,330,943.00

Sumber : PT HJKL

Keterangan :

∅ = Telah ditelusuri ke Buku Besa
Λ = Footing



Perhitungan Dan Perbandingan Saldo Piutang Dagang

PT. HADJI KALLA

Nomor Rek	Perkiraan	Neraca akhir		Perbedaan	
		Tahun Berjalan (Belum di audit) 31 Desember 2005	Tahun Lalu (Sudah diaudit) 31 Desember 2004	Absolut (Rp)	Persen (%)
113	Piutang Dagang (Penjualan Mobil)	Rp. 4.611.330.943	Rp. 3.980.252.700	Rp. 4.7767.950	5,8

**Hubungan Daftar Saldo Menurut Kartu
Piutang Dengan Saldo Buku Besar**

PT. HADJI KALLA																																											
Tgl	Uraian	Mutasi		D/K	Saldo																																						
		D	K																																								
					24.636.149																																						
Pemb.1 : sisa bulan		Type:																																									
Alamat :		Kontrak No:																																									
Nama :																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/1</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>12/1</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>12/1</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>12/1</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>Rp. 114.181.794</u></td> </tr> </tbody> </table>						Jumlah		12/1	Rp.	12/1	Rp.	12/1	Rp.	12/1	Rp.	<u>Rp. 114.181.794</u>																											
Jumlah																																											
12/1	Rp.																																										
12/1	Rp.																																										
12/1	Rp.																																										
12/1	Rp.																																										
<u>Rp. 114.181.794</u>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">BUKU BESAR</th> </tr> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Perkiraan: (113C111) Piutang Dagang</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Tgl</th> <th rowspan="2">No. BKT</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Mutasi</th> <th rowspan="2">Saldo (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Debet (Rp)</th> <th>Kredit (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Total Jumlah</td> <td> </td> <td> </td> <td>7.393.391.137,61</td> </tr> </tbody> </table>						BUKU BESAR						Perkiraan: (113C111) Piutang Dagang						Tgl	No. BKT	Uraian	Mutasi		Saldo (Rp)	Debet (Rp)	Kredit (Rp)															Total Jumlah			7.393.391.137,61
BUKU BESAR																																											
Perkiraan: (113C111) Piutang Dagang																																											
Tgl	No. BKT	Uraian	Mutasi		Saldo (Rp)																																						
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)																																							
		Total Jumlah			7.393.391.137,61																																						

PT. HADJI KALLA

Kepada
Yth. Alwi Jaya
Di Palopo

Dengan hormat,

Kami minta saudara memberitahu auditor kami Andi Kumala mengenai benar tidaknya saldo utang saudara kepada kami seperti yang kami cantumkan di dalam formulir di bagian bawah surat ini. Jika terdapat ketidakcocokan antara catatan kami, dengan catatan saudara, silahkan menjelaskan penyebabnya.

Jawaban segera kami harapkan dari Saudara, dengan mengembalikan bagian bawah suart ini di dalam amplop berperangko yang kami sertakan bersama surat ini, langsung kepada auditor kami tersebut di atas.

PT. HJKL

FATIMAH KALLA
Direktur Keuangan

Surat ini bukan permintaan untuk pembayaran utang saudara tapi hanya merupakan konfirmasi saldo rekening utang saudara kepada kami.

.....

Yth. Andi Kumala
Jl. Abu Kadir Hartaco Indah
Blok I Q No. 2 Ujung Pandang

Dengan hormat,

Pernyataan saudara bahwa saldo utang kami kepada Saudara pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 90.085.450,- adalah benar dengan penjelasan sebagai berikut ini :

Hormat saya,

Alwi Jaya

PT. HADJI KALLA

Kepada
Yth. Samuel Sellano
Di Ujung Pandang

Dengan hormat,

Kami minta saudara memberitahu auditor kami Andi Kumala mengenai benar tidaknya saldo utang saudara kepada kami seperti yang kami cantumkan di dalam formulir di bagian bawah surat ini. Jika terdapat ketidakcocokan antara catatan kami, dengan catatan saudara, silahkan menjelaskan penyebabnya.

Jawaban segera kami harapkan dari Saudara, dengan mengembalikan bagian bawah suart ini di dalam amplop berperangko yang kami sertakan bersama surat ini, langsung kepada auditor kami tersebut di atas.

PT. HJKL

FATIMAH KALLA
Direktur Keuangan

Surat ini bukan permintaan untuk pembayaran utang saudara tapi hanya merupakan konfirmasi saldo rekening utang saudara kepada kami.

Yth. Andi Kumala
Jl. Abu Kadir Hartaco Indah
Blok I Q No. 2 Ujung Pandang

Dengan hormat,

Pernyataan saudara bahwa saldo utang kami kepada Saudara pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 56.687.400,- adalah benar dengan penjelasan sebagai berikut ini :

Hormat saya,

Samuel Sellano

PT. HJKL
WORKING TRIAL BALANCE-KONFIRMASI PIUTANG DAGANG

* Metode konfirmasi yang digunakan perusahaan adalah :

- a. Konfirmasi positif, dengan alasan terdapat debitur yang mempunyai saldo piutang secara individual lebih besar dari saldo piutang lainnya.
- b. Konfirmasi negatif, dengan alasan pengendalian intern terhadap piutang dinilai baik oleh auditor hal ini terlihat dari jawaban kuesioner pengendalian intern piutang.

Indeks	Saldo Piutang Dagang (Rp)	
<u>Konfirmasi Positif</u>	<u>yang dikonfirmasi</u>	
B-2.1	90.085.450	Jumlah persentase dari total piutang adalah :
B-2.2	56.687.400	
B-2.3	<u>3.868.800</u>	
Total	150.641.650,-	$\frac{Rp.150.641.650}{4.611.330.943} \times 100\% = 3\%$

^

Jumlah piutang dagang yang dikonfirmasi negatif sebesar Rp. 2.375.722.132,- (=)

Maka jumlah persentase dari total piutang adalah

$$\frac{Rp.2.375.722.132}{4.611.330.943} \times 100\% = 51\%$$

Catatan :

* Konfirmasi piutang dagang bentuk negatif tidak ada yang dijawab~~by~~, semua debitur setuju dengan isi konfirmasi tersebut.

* Jumlah persentase piutang dagang secara keseluruhan adalah :
(dari total piutang dagang)

$$51\% + 3\% = 54\%$$

auditor menganggap jumlah 54% ini cukup untuk membuktikan eksistensi piutang dagang tahun yang diperiksa.

^ = footing

(=) = jumlah sama dengan konfirmasi negatif

PT. HADJI KALLA

Kepada
Yth. Marzuki Ramli
Di Ujung Pandang

Dengan hormat,

Kami minta saudara memberitahu auditor kami Andi Kumala mengenai benar tidaknya saldo utang saudara kepada kami seperti yang kami cantumkan di dalam formulir di bagian bawah surat ini. Jika terdapat ketidakcocokan antara catatan kami, dengan catatan saudara, silahkan menjelaskan penyebabnya.

Jawaban segera kami harapkan dari Saudara, dengan mengembalikan bagian bawah suart ini di dalam amplop berperangko yang kami sertakan bersama surat ini, langsung kepada auditor kami tersebut di atas.

PT. HJKL

FATIMAH KALLA
Direktur Keuangan

Surat ini bukan permintaan untuk pembayaran utang saudara tapi hanya merupakan konfirmasi saldo rekening utang saudara kepada kami.

.....

Yth. Andi Kumala
Jl. Abu Kadir Hartaco Indah
Blok I Q No. 2 Ujung Pandang

Dengan hormat,

Pernyataan saudara bahwa saldo utang kami kepada Saudara pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 9.447.900,- adalah benar dengan penjelasan sebagai berikut ini :

Hormat saya,

Marzuki Ramli

PT. HADJI KALLA
Ringkasan Jurnal Penyesuaian
31 Desember 2005

(dalam Rupiah)

No urut	Keterangan	Debet	Kredit
1	Kas	Rp. 3868.800	
	Piutang dagang		Rp. 3.454.290
	Pendapatan Bunga		Rp. 414.510
	(untuk mendapat penerimaan angsuran/piutang dan pendapatan bunga)		

PT. HADJI KALLA

Working Trial Balance

31 Desember 2005

Nomor Perkiraan	Nama Perkiraan	Indeks kertas kerja	Saldo menurut buku 31 Desember 1998		Penyesuaian		Saldo Per-Audit 31 Desember 1998	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
113	Piutang Dagang		4.611.330.943				4.611.330.943	
113	Piutang Dagang				3.454.290		4.607.876.653	

Terbilang: Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga

Keadaan laporan keuangan PT. Hadji Kalla Makassar setelah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

PT. HADJI KALLA MAKASSAR
NERACA
PERIODE 31 DESEMBER 2005

AKTIVA

Aktiva Lancar :

Kas dan setara kas	Rp. 23.284.686.621
Piutang Dagang	178.275.748.866
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<u>(15.449.567.554)</u>
Piutang Dagang Netto	Rp. 162.826.181.312
Persediaan Barang Dagang	77.511.493.729
Uang Muka Pembelian	28.860.199.092
Uang Muka Pajak	26.913.482.216
Biaya dibayar dimuka	<u>16.845.264.351</u>

Jumlah Aktiva Lancar Rp. 336.241.307.321

Investasi atau Penyertaan Rp. 116.125.743.739

Aktiva Tetap :

Harga Perolehan	Rp. 121.126.171.812
Akm. Penyusutan dan amortisasi	<u>(36.647.111.759)</u>

Jumlah Aktiva Tetap Rp. 88.479.060.053

Aktiva lain-lain :

Surat berharga	Rp. 12.421.211.116
Uang Jaminan	9.582.235.750
Piutang lainnya	<u>10.117.725.115</u>

Jumlah aktiva lain-lain Rp. 32.121.171.981

TOTAL AKTIVA

Rp. 572.967.283.094

PT. HADJI KALLA MAKASSAR
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 2005

Pendapatan		
Penjualan	Rp. 742.815.620.379	
Potongan penjualan	<u>(22.284.468.609)</u>	
Penjualan bersih	Rp. 720.531.151.770	
Harga Pokok Penjualan	<u>(528.780.735.872)</u>	
Laba Kotor		Rp. 137.750.415.898
Biaya Usaha:	Rp. 24.343.584.013	
Biaya penjualan	17.601.714.969	
Biaya umum dan administrasi	<u>15.449.567.554</u>	
Biaya piutang tak tertagih		
Jumlah Biaya Usaha		<u>Rp. 57.394.866.536</u>
Laba Usaha		Rp. 80.355.549.362
Penghasilan (Biaya) lain-lain :		
Penghasilan bunga	Rp. 6.902.122.712	
Biaya keuangan	<u>(23.012.364.691)</u>	
Biaya lain-lain	<u>(3.462.023.902)</u>	
Jumlah Penghasilan (biaya) lain-lain		(Rp. 19.572.265.881)
Laba bersih sebelum taksiran PPh		Rp. 60.783.283.481
Pajak penghasilan		<u>(366.192.530)</u>
Laba bersih setelah PPh		<u>Rp. 60.417.090.951</u>

Sumber : PT. Hadji Kalla Makassar, 2005

Sebagai dasar argumentasi dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan penetapan penjualan kredit atau piutang yaitu :

1. Setiap piutang yang macet harus jelas permasalahannya dan didukung dengan dokumen yang lengkap dan sah menurut hukum.
2. Kantor pusat divisi keuangan akan melakukan konsolidasi piutang macet dari seluruh Indonesia untuk diajukan kepada direktur keuangan.
3. Direktur keuangan bersama direktur lainnya membahas proposal penghapusan piutang dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
4. Berdasarkan hasil pembahasan diantara direksi, maka direktur utama mengajukan pengusulan penghapusan piutang ragu-ragu kepada dewan komisaris.
5. Berdasarkan persetujuan dewan komisaris, maka divisi keuangan memberikan informasi kepada seluruh cabang dengan tembusan kepada divisi akuntansi.

Piutang yang macet harus didukung dengan dokumen yang lengkap dan jelas sehingga dapat ditelusuri penyebabnya. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Membuat surat kontrak perjanjian kerjasama order pemberitahuan cofimation (konfirmasi pesanan) surat-surat korespondensi yang merupakan surat ikatan yang sah secara hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Daftar jaminan yang dilampiri surat bukti kepemilikan.
3. Proses penagihan dapat melalui korespondensi atau kartu kunjungan

4. Data atau informasi lainnya yang dapat menjelaskan duduk persoalannya dari para pelanggan.

Suatu hal yang prinsip adalah tindakan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah kerugian piutang dalam penjualan kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengantisipasi besarnya kerugian saat diterimanya order dan dibuat kontrak penjualan pemberian kredit pelanggan yang bersangkutan harus membayar 50% uang muka. Pada saat terselesainya kontrak, sertifikat tidak akan diterbitkan sebelum pembayaran sisa kontrak sebesar 50%. Prosedur ini berlaku untuk pelanggan baru dan pelanggan lama.
2. Pada saat diadakannya kontrak pemberian kredit oleh PT. Hadji Kalla Makassar terlebih dahulu mengecek daftar pelanggan yang bersangkutan, apakah terdapat piutang pada waktu sebelumnya, sehingga pelanggan harus melunasi terlebih dahulu baru kemudian kredit diberikan kembali oleh perusahaan. Prosedur ini berlaku untuk pelanggan lama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dari penulisan ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Saldo piutang dagang PT. HJKL telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atas pengendalian intern terhadap piutang PT. HJKL sebagai berikut:
 - Uang yang diterima oleh penagih dari pembayaran utang debitur, tidak langsung disetorkan ke kas, yang seharusnya langsung disetor agar berkurangnya piutang segera dicatat.
 - Bukti penerimaan kas yang digunakan penagih, tidak menggunakan nomor urut tercetak, sehingga sulit ditelusuri penggunaannya.
 - Fungsi akuntansi tidak mengirimkan surat pernyataan piutang kepada debitur secara periodik, sehingga sulit membuktikan kebenaran jumlah saldo piutang debitur yang bersangkutan.
- b. PT. HJKL tidak membentuk cadangan kerugian piutang, dengan alasan kebijakan perusahaan memberikan jangka waktu/toleransi pembayaran angsuran kendaraan adalah 3 bulan, melewati batas tersebut, kendaraan ditarik kembali. Jadi, resiko kerugian dapat dikurangi.

6.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan dalam penulisan ini, penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

a. Mengingat pemisahan fungsi merupakan dasar adanya pengendalian intern yang baik maka :

- Hendaknya uang yang diterima oleh penagih dari pembayaran utang debitur, langsung disetor ke kas, selain menghindari penggelapan uang, juga untuk memudahkan pencatatan berkurangnya piutang.
- Hendaknya bukti kas masuk yang digunakan oleh penagih menggunakan nomor urut tercetak agar mudah melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan, yang merupakan upaya untuk menciptakan praktek yang sehat.
- Hendaknya fungsi pencatat piutang mengirim pernyataan piutang (*account receivable statement*) kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh bagian tersebut.

Pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dicatat oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 1995, **Auditing**, BPFE, Yogyakarta.
- Al Haryono Jusuf, 1993, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Jilid 2, Edisi Keempat, BPSTIE, YKPN, Yogyakarta.
- Alvian A. Arens dan James K. Loebbecke, 1991, **Auditing and Integrated Approach, Fifth Edition**, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Fauzi, 1995, **Kamus Akuntansi Praktis**, Edisi Satu, Penerbit Indah Surabaya.
- H. S. Munawir, 1995, **Auditing Modern**, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, **Standar Akuntansi Keuangan**, Penerbit Salemba Empat.
- Jay M. Smith and K. Fred Skousen, 1989, **Intermediate Accounting**, Eight Edition, Cincinnati South Western Publishing.
- Mulyadi, 1990, **Pemeriksaan Akuntan**, Edisi 3, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN Yogyakarta.
- Ruchyat Kosasih, 1984, **Auditing Prinsip dan Prosedur**, Buku Satu, Cetakan Ketiga, Penerbit Ananda Yogyakarta.
- Theodorus M. Tuankotta, 1982, **Auditing Petunjuk Pemeriksaan Akuntansi Publik**, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Walter G. Keell, William C Boynton, 1996, **Modern Auditing, Sixth Edition**, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
- Zaki Baridwan, 1992, **Intermediate Accounting**, BPFE, Yogyakarta.